

ESENSI DAN URGENSI KAJI TINDAK PARTISIPATIF DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN BERBASIS SUMBERDAYA PERTANIAN

The Essence and Urgency of Participatory Action Research in Rural Community-Based Agricultural Resource Empowerment

Muhammad Iqbal, Edi Basuno, dan Gelar Satya Budhi

*Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jalan Ahmad Yani 70, Bogor 16161*

ABSTRACT

It is believed that action research has been numerously implemented for a long time in Indonesia. Nevertheless, it can be generally stated that its implementation was relatively lack in accommodating farmer's aspiration. As a result, a method of participatory action research needs to be recommended. This article aims to review the essence and urgency of participatory action research focused on rural community-based agricultural empowerment. At least, there are three pillars of participatory action research towards community empowerment, namely participation, facilitation, and intervention. However, the implementation of participatory action research is time-consuming and depends on community's initiative in determining needs priority. Interactive participation and creativity through participation as well as democracy-based facilitation and intervention should be carried out. Hence, it is implied that the development of community's aspiration (bottom-up approach) still requires top-down approach, which is free from paternalistic attribute.

Key words : *action research, participatory, empowerment, community, agriculture, rural*

ABSTRAK

Kaji tindak merupakan jenis penelitian yang cukup banyak dan telah lama dilakukan di Indonesia, namun secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaannya masih kurang mengakomodasi aspirasi petani. Oleh karena itu, penggunaan metode kaji tindak yang partisipatif perlu direkomendasikan. Tulisan ini bertujuan untuk mereview esensi dan urgensi kaji tindak partisipatif dengan titik tumpu pemberdayaan masyarakat khususnya di wilayah perdesaan berbasis sumberdaya pertanian. Paling tidak ada tiga pilar dalam kaji tindak pemberdayaan masyarakat, yaitu partisipasi, fasilitasi, dan intervensi. Akan tetapi, implementasi kaji tindak dalam pemberdayaan masyarakat memerlukan waktu, tergantung inisiatif masyarakat dalam menentukan keperluan prioritas mereka. Partisipasi secara interaktif dan kreatif serta fasilitasi dan intervensi yang berpedoman pada prinsip demokrasi perlu dijalankan. Implikasinya, pengembangan aspirasi masyarakat tetap membutuhkan upaya yang bersifat pendekatan dari atas namun terbebas dari sikap paternalistik.

Kata kunci : *kaji tindak, partisipatif, pemberdayaan, masyarakat, pertanian, perdesaan*

PENDAHULUAN

Penelitian merupakan salah satu elemen penting dalam menunjang aktivitas pembangunan pertanian. Elemen penting tersebut mencakup penelitian mengenai (Deptan, 2002): (1) pengembangan sumberdaya alam (tanah, air, iklim, dan hayati); (2) pengembangan komoditas unggulan (termasuk pascapanen dan diversifikasi teknologi produksi); (3) pengembangan bio-teknologi (rekayasa genetik, biologi molekular, diagnostik teknologi, dan mikrobiologi); (4) analisis sosial ekonomi dan kebij-

kan pertanian; (5) pengembangan teknologi spesifik lokasi; (6) penyebarluasan (diseminasi) teknologi hasil penelitian; dan (7) pengembangan kelembagaan (institusi) teknologi.

Salah satu model penelitian yang dianggap strategis melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan adalah kaji tindak (*action research*) yang sudah cukup banyak dan telah lama diimplementasikan di Indonesia. Di lingkup Departemen Pertanian, implementasi kaji tindak terutama berkaitan dengan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penggunaan paket teknologi pada sub-sektor tanaman pangan, peternakan, perke-

bunan, dan perikanan seperti dalam kegiatan Sistem Usahatani berbasis Padi (SUTPA), Konservasi Lahan Marjinal dan Daerah Aliran Sungai (DAS), Pengendalian Hama Terpadu (PHT), *Corporate Farming*, PIDRA (*Participatory Integrated Development in Rainfed Area*), dan Primatani (Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian). Implementasi kaji tindak tersebut umumnya dilakukan dalam rangka diseminasi teknologi pada berbagai agroekosistem. Kaji tindak juga dapat berupa introduksi ketatalaksanaan organisasi seperti kelompok tani, koperasi, organisasi pengolahan, serta alat dan mesin pertanian.

Walaupun sebagian kaji tindak yang diimplementasikan Departemen Pertanian memberikan hasil yang cukup berarti, namun secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaannya masih kurang mengakomodasi aspirasi petani. Dalam berbagai aktivitas kaji tindak tersebut, secara fisik petani praktis memang dilibatkan, namun hanya dalam rangka melaksanakan instruksi peneliti. Oleh karena itu, untuk lebih mengakomodasi aspirasi petani dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kaji tindak, penggunaan metode kaji tindak yang partisipatif (*participatory action research*) perlu direkomendasikan (Basuno et al., 2005).

Dalam implementasi kaji tindak, khususnya untuk tujuan pemberdayaan masyarakat, konsep pengembangannya lebih ditekankan pada investasi dalam rangka peningkatan kemampuan masyarakat sebagai pengelola pembangunan (Pakpahan, 2005). Dengan kata lain, fokus pelaksanaannya tidak hanya pada pembangunan fisik semata sebagaimana telah sering dilakukan, melainkan juga pembangunan nonfisik. Secara garis besar, investasi masyarakat tersebut dapat berupa : (1) investasi sumberdaya manusia (*human investment*) seperti pendidikan, pengetahuan, keahlian, kesehatan, gizi, dan sebagainya; dan (2) investasi sosial (*social investment*) antara lain meliputi keyakinan/kepercayaan (*trust*), manfaat timbal balik (*reciprocity*), partisipasi dalam jaringan, dan sikap proaktif.

Program pemberdayaan melalui kaji tindak dinilai akan efektif karena didasarkan pada potensi lokal dalam lingkungan komunitas kecil yang relatif homogen. Substansi utama pemberdayaan masyarakat adalah un-

tuk memotivasi tumbuhnya aksi bersama (*collective action*) dalam rangka mengatasi masalah yang mereka hadapi, yang selanjutnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Tujuan ini akan dapat dicapai apabila masyarakat disadarkan mengenai permasalahan yang sedang mereka hadapi, dan dengan itu kemudian mereka didorong untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang lebih efektif melalui pendekatan kaji tindak

Tulisan ini bertujuan melakukan analisis kritis tentang esensi dan urgensi kaji tindak partisipatif dengan titik tumpu (*entry point*) berupa pemberdayaan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan berbasis sumberdaya pertanian. Uraian diawali dengan pengertian (definisi) kaji tindak, diikuti dengan uraian mengenai esensi dan urgensinya. Uraian berikutnya diarahkan untuk penarikan kesimpulan dan implikasi kebijakan terkait dengan aplikasi dan implementasi kaji tindak dalam rangka pemberdayaan masyarakat pertanian dan pedesaan.

PENGERTIAN KAJI TINDAK PARTISIPATIF

Pada hakekatnya, penelitian lahir dari proses determinasi jalan keluar permasalahan yang dihadapi manusia dalam kehidupannya. Dalam kaitan ini, Good dan Scates (1972) mengemukakan bahwa penelitian adalah : "... *the open door to a better future; it is the source of faith that man can go forward; it is the challenge that removes the threat of stagnation and decay from all society.*

Secara ilmiah, penelitian didefinisikan secara beragam namun bermuara dalam satu substansi pengertian yang sama. Kerlinger (1973) mendefinisikan penelitian sebagai suatu investigasi sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis terhadap preposisi hipotesis. Di dalamnya termuat metode-metode mendasar seperti metode sejarah (*historical method*), metode deskriptif (*descriptive method*), metode kasus lapangan (*case and field method*), metode perbandingan (*causal comparative method* atau *ex-post facto method*), metode eksperimen (*experimental method*), dan metode kaji tindak (*action research*).

Avison et al. (1997) mengemukakan bahwa terdapat cukup banyak pengertian ten-

tang kaji tindak. Para peneliti umumnya mempunyai kecenderungan membangun pendekatan yang bersifat kasuistik. Akan tetapi, esensi dari pengertian kaji tindak sebenarnya terkandung dalam namanya, yaitu kombinasi antara kajian (*research*) dan tindakan (*action*), atau dengan kata lain terdiri dari teori dan praktek (McKay dan Marshall, 2001).

Kaji tindak mencakup dihasilkannya pengetahuan baru dalam rangka pemecahan masalah atau perbaikan terhadap pemecahan masalah dalam kehidupan praktis (Elden dan Chisholm, 1993). Dapat dikatakan bahwa kaji tindak bukan sekadar pendekatan terhadap pemecahan masalah, melainkan disertai juga kerangka konseptual yang melatarbelakangi-nya. Oleh sebab itu, kaji tindak harus mencerminkan konsep strategi pengujian, perbaikan, dan pengembangan metode dalam rangka memperbaiki situasi dan kondisi permasalahan tertentu yang dinilai tidak optimal.

Kaji tindak partisipatif merupakan kombinasi antara penelitian (*research*) dengan tindakan (*action*) yang dilakukan secara partisipatif guna meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan itu, integrasi dan partisipasi antara sesama peneliti, obyek yang diteliti, para pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan elemen masyarakat lainnya merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan (Gonsalves *et al.*, 2005).

Dalam kaji tindak partisipatif, kerja sama antara peneliti dengan "pemilik masalah" (*problem owner*) merupakan hal penting untuk diterapkan. Ketergantungan saling menguntungkan antara peneliti dan pemangku masalah terletak pada pemahaman bersama terhadap masalah yang harus dipecahkan, keterampilan, pengalaman, dan kompetensi; agar proses penelitian dan pengembangannya dapat mencapai dua tujuan utama berupa pengetahuan metode baru dalam pemecahan masalah secara praktis (Hult dan Lennung, 1980). Dalam hal ini, peneliti mendapatkan kerangka intelektual dan pengetahuan baru dalam pemecahan masalah, sedangkan pemilik masalah mendapatkan metode yang lebih efisien dalam pemecahan masalah secara praktis di lapangan (Burns, 1994).

Dalam konteks pengembangan masyarakat (*community development*), kaji tindak partisipatif ditujukan untuk memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat yang tidak

berdaya. Strategi yang digunakan para praktisi dalam kegiatan kaji tindak partisipatif biasanya berlandaskan konflik kepentingan masyarakat. Implementasinya, aksi kegiatan diawali dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya, berikutnya transformasi sosial ekonomi, hingga pada akhirnya diharapkan tercipta suatu tatanan politik masyarakat yang berdaya (*political community's empowerment*). Hal yang patut diperhatikan adalah peneliti kaji tindak partisipatif harus mendedikasikan dirinya untuk bekerja bebas dari dominasi sistem kekuasaan (Tandon, 1981; Brown, 1985).

Kunci pokok kegiatan kaji tindak partisipatif adalah partisipasi. Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa suatu kaji tindak akan berkelanjutan melalui partisipasi semata. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Selener (1997) yang menyatakan bahwa partisipasi memiliki bermacam-macam tipe, mulai dari partisipasi teknis (*technical participation*), partisipasi semu (*pseudo participation*), hingga partisipasi murni (*genuine participation*).

Partisipasi teknis dapat digunakan untuk pemberdayaan, atau paling tidak guna memenuhi kebutuhan kelompok. Partisipasi semu dapat dipakai dalam pemberdayaan suatu kelompok, namun membatasi pemberdayaan kelompok lainnya. Sementara itu, partisipasi murni dapat membawa masyarakat menuju pemberdayaan dan demokratisasi dalam pengelolaan sumberdaya. Oleh karena itu, tipe partisipasi yang patut dipilih dalam kegiatan kaji tindak partisipatif yang berkelanjutan adalah partisipasi murni (*genuine participation*) untuk semua pihak yang terlibat di dalamnya.

ESENSI KAJI TINDAK PARTISIPATIF

Salah satu hal esensial yang membedakan kaji tindak partisipatif dengan penelitian konvensional terletak pada peran dan keterlibatan peneliti. Dalam kaji tindak partisipatif, peneliti berperan secara pro-aktif dan sengaja (*purposive*) melibatkan diri dalam pengembangan metode baru dalam pemecahan masalah secara praktis. Sementara itu, dalam penelitian konvensional, peneliti boleh dikatakan sebagai pelaku netral (Chalmers, 1982). Dalam kaji tindak partisipatif, peneliti dipan-

dang sebagai salah satu pelaku utama yang bekerja secara bersama-sama dengan pihak yang mempunyai kepentingan, atau sebagai pihak yang dipengaruhi, untuk menghasilkan perubahan atau kemajuan dalam pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari (Checklan, 1991; Hult dan Lennung, 1980).

Henderson (2005) menyatakan bahwa perbedaan mendasar antara kaji tindak partisipatif dengan penelitian konvensional antara lain terletak pada konsep dasar (subyek/ sistem) yang menggunakan analisis sistem hubungan sebab akibat antar sub-sistem yang membentuk masalah, eksistensi peneliti, dan pengetahuan atau metode baru yang dapat dirumuskan dari penganalisaan terhadap sistem masalah. Lengkapnya perbedaan-perbedaan tersebut disajikan pada Tabel 1.

Henderson (2005) mengemukakan bahwa biasanya penelitian konvensional memiliki proses hubungan lurus (*linear*) dengan: (1) definisi permasalahan dan hipotesis; (2) pengumpulan data dan analisis; (3) kesimpulan dan rekomendasi; dan (4) opsi transfer pengetahuan kepada para pengguna (*users*). Penelitian dilaksanakan oleh seseorang atau tim yang sudah terlatih dalam bidang metodologi dan lazimnya menyandang predikat gelar profesional 'peneliti' yang sekaligus sebagai pihak luar (*eksternal*) dari subyek permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu,

dari konsep ini peneliti mengharapkan agar pengetahuan (pemecahan masalah) hasil penelitiannya langsung diadopsi atau digunakan oleh para praktisi tanpa harus melalui hubungan konsultasi yang bersifat interaktif. Peneliti tidak dapat dituntut secara langsung jika pengetahuan pemecahan masalah yang dihasilkan terdapat kejanggalaan atau melahirkan masalah baru.

Kaji tindak partisipatif memiliki karakteristik lingkaran spiral (*spiraling circle*), yang dimulai dari refleksi, pertanyaan, tugas lapang, dan analisis yang dilakukan secara berulang (*iterative*). Dalam kaji tindak partisipatif, kompleksitas sistem saling berinteraksi antara satu dengan lainnya. Tiga subsistem yang menjadi acuan perhatian dalam sistem kaji tindak partisipatif adalah (1) Subekosistem. Sumberdaya alam dan lingkungan (*natural resources and environmental capital*) bersifat terbatas, dimana eksistensinya terkait dengan kompleksitas pola bio-fisik dan proses; (2) Subsistem Sosial Ekonomi. Sumberdaya alam memiliki nilai guna dalam sistem kehidupan manusia, dan pemanfaatannya memerlukan hubungan interaktif dengan subsistem kultural sosial ekonomi (*cultural socioeconomic capital*); (3) Subsistem Kebijakan dan Kelembagaan. Pemanfaatan sumberdaya alam secara publik merupakan refleksi dari sistem kekuasaan dan manajemen pengambilan keputusan yang di dalamnya melibatkan hubungan kerjasama, persaingan,

Tabel 1. Perbedaan antara Penelitian Konvensional dengan Kaji Tindak Partisipatif

Penelitian Konvensional	Kaji Tindak Partisipatif
Subyek permasalahan relatif parsial:	Subyek permasalahan bersifat multidimensi, sistemik, dan holistik:
a. Cukup merepresentasikan tipe pengetahuan tunggal (<i>single type of knowledge</i>) yang secara tipikal hanya berkaitan dengan satu atau dua disiplin ilmu	a. Memerlukan representasi berbagai jenis disiplin atau keahlian dalam rangka mewujudkan integrasi pengetahuan baru
b. Kausalitas hubungan lurus (<i>linear</i>)	b. Kausalitas umpan balik
Subyek permasalahan dapat diikat (<i>bounded</i>), atau dengan kata lain implementasinya dengan kemampuan kendali yang sangat terbatas	Subyek permasalahan tidak sepenuhnya dapat diikat (<i>bounded</i>) dan implementasinya adalah untuk menangani perubahan-perubahan yang lebih kompleks dengan kendali yang bersifat <i>multy entry</i>
Peneliti terpisah dari permasalahan	Peneliti berperan secara pro-aktif dan keterlibatannya bersifat interaktif.
Hasil penelitian ditransferkan dan tidak ada kewajiban langsung bagi peneliti untuk bertanggungjawabkan jika terdapat kejanggalaan atau kesalahan dalam alternatif pemecahan masalah yang direkomendasikan.	Hasil penelitian terkait dengan peran aktif dan hubungan tanggungjawab timbal balik dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan kapasitas secara kolektif.

Sumber: Henderson, 2005

dan konflik (baik di tingkat lokal maupun nasional dan bahkan internasional).

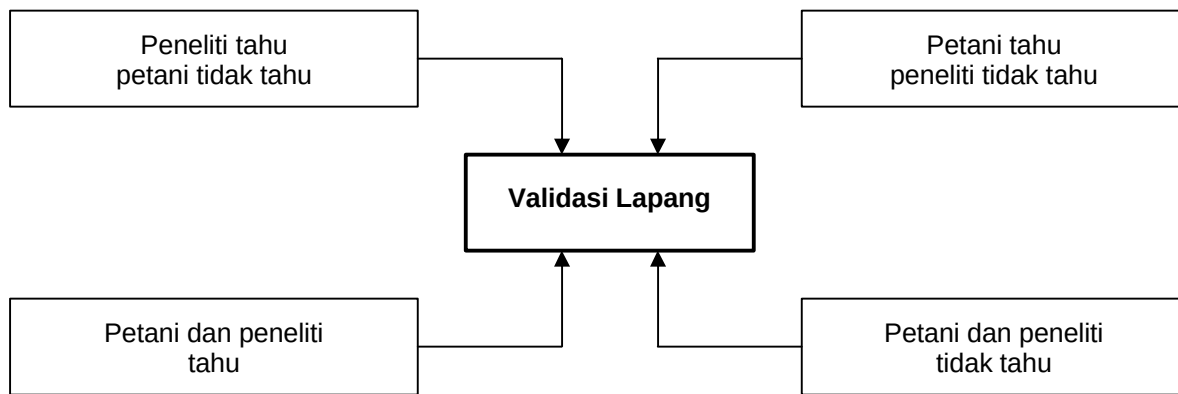
Kaji tindak partisipatif bukan pendekatan bersifat tunggal (*single approach*), melainkan penggabungan beberapa pendekatan sekaligus dengan tujuan agar partisipan dapat mengembangkan pengertian dan pengawasan dalam investigasi proses dan fenomena yang terjadi. Oleh karena itu, kaji tindak partisipatif mengandung prinsip-prinsip kunci sebagai berikut (Gonsalves *et al.*, 2005): (a) Merefleksikan secara jelas dan logis fokus masalah yang akan dijadikan agenda penelitian (penyusunan prioritas) antar pemangku kepentingan berikut kontribusinya dalam membangun kerjasama (*partnership*) antar pemangku kepentingan dalam merumuskan pendekatan untuk penyelesaian masalah; (b) Mengembangkan kapasitas inovasi di kalangan pemangku kepentingan agar secara bersama-sama menelaah dan mengembangkan ketatalaksanaan pengelolaan sumberdaya pertanian dan perdesaan yang terbatas; (c) Mengintegrasikan kompleksitas dan dinamika perubahan sistem dan proses pengelolaan sumberdaya alam dan manusia yang unik pada kegiatan pertanian dan perdesaan; (d) Memadukan aneka jenis informasi dan metode dengan pengetahuan melalui pembelajaran partisipatif; (e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara partisipatif agar proses penelitian sesuai dengan standar pelaksanaan; (f) Melakukan penelitian berdasarkan proses pembelajaran secara berulang (*iterative*), umpan balik, serta saling berbagi informasi yang menjadi pengetahuan bersama; (g) Menyadari secara bersama-sama bahwa interaksi antara kekuasaan dan kerjasama merupakan bagian dari strategi penelitian dalam rangka merumuskan pengetahuan dan metode penyelesaian masalah praktis secara komprehensif; dan (h) Membangun hubungan antar pemangku kepentingan berlandaskan prinsip saling menghargai (*mutual respect*), rasa saling percaya (*mutual trust*), saling terbuka (*mutual openness*), dan saling menguntungkan (*mutual benefit*) dalam pengambilan keputusan kolektif.

Dari prinsip-prinsip kunci di atas, kaji tindak partisipatif diimplementasikan sebagaimana tertera pada Gambar 1. Pelaksanaan kaji tindak partisipatif didahului dengan sosialisasi, pengamatan lapang, identifikasi kontak personal, pengumpulan data dan informasi

sekunder, dan penilaian lokasi secara partisipatif (*Participatory Rural Appraisal*). Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) disamping digunakan untuk melakukan penilaian terhadap lokasi, juga dimanfaatkan dalam rangka mengetahui masalah dan potensi yang dimiliki masyarakat baik berupa sumberdaya alam, manusia, dan sosial ekonomi. Hasil PRA dijadikan dasar untuk melakukan kaji tindak pemberdayaan masyarakat secara partisipatif. Implementasinya, model kaji tindak teoritis diterapkan melalui beberapa perbaikan dan pengulangan (*iterative*). Model tersebut kemudian didesiminasikan kepada masyarakat untuk diaplikasikan dan direplikasikan secara luas (*scaling up*).

Dimensi utama kaji tindak partisipatif bertumpu pada validasi lapang dengan titik tumpu (*entry point*) tingkat pengetahuan peneliti dan petani (Gambar 2). Deskripsi karakteristiknya antara lain sebagai berikut: (1) orientasi penelitian adalah untuk mencari solusi permasalahan secara praktis dan bermanfaat bagi pengguna (*users*); (2) perspektif pengguna berpengaruh dalam memberikan umpan bagi kegiatan penelitian; (3) pemanfaatan hasil penelitian merupakan hal yang esensial berlandaskan hasil kajian lapangan yang bersifat partisipatif dan komprehensif; (4) kegiatan penelitian dilaksanakan secara lintas disiplin (*interdisciplinary method*); dan (5) metode penelitian kualitatif dan antropologis diperlukan, namun penerapannya tidak dilakukan secara eksklusif (Niehof *et al.*, 2003).

Penerapan metode kaji tindak dalam pemberdayaan masyarakat pertanian dan pedesaan diharapkan memberikan masukan yang lebih baik dalam pemecahan masalah di bidang pertanian dan pedesaan. Niehof *et al.* (2003) mengemukakan bahwa kaji tindak partisipatif memiliki beberapa nilai tambah (*added value*), di antaranya mencakup: (1) bermanfaat ganda bagi pengguna (pada kegiatan usaha pertanian dan pedesaan); (2) dapat mengidentifikasi masalah secara berulang (*iterative*) dan interaktif; (3) bersifat lentur (*flexible*) dan dapat melengkapi proses penelitian konvensional; (4) dapat mengidentifikasi tingkat partisipasi peserta (petani); (5) berfungsi dalam melengkapi dan memberikan masukan serta penilaian terhadap data dan informasi; (6) memberikan ruang kepada petani untuk mengadopsi dan memodifikasi



Gambar 2. Dimensi Utama Kaji Tindak Partisipatif (Niehof *et al.*, 2003)

inovasi teknologi sesuai dengan kebutuhan mereka; (7) menghindarkan pencitraan bahwa kegiatan yang selama ini seolah-olah melekat dan hanya menjadi milik kaum praktisi usaha pertanian dan pedesaan; (8) merubah perspektif peneliti teknis agar ikut merasa memiliki, sebagaimana keharusan pada salah satu mazhab penelitian sosial (penelitian untuk pembangunan); (9) melibatkan semua pemangku kepentingan sejak dari kegiatan awal hingga akhir suatu kegiatan pengembangan teknologi (hilir), dan memberikan mereka rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap kegiatan tersebut; (10) mengembangkan hubungan antara pemangku kepentingan dan praktisi yang didasarkan pada azas saling percaya (*mutual trust*) dan proses pembelajaran bersama (*mutual learning experience*); (11) meningkatkan kemampuan peneliti dalam membantu memecahkan permasalahan petani secara tepat; dan (12) membangun rasa saling tanggungjawab (*mutual obligation*), andil dalam pembiayaan, dan memperoleh manfaat (kesuksesan) secara kolektif (*mutually collective benefit*).

Disamping nilai tambah (keunggulan) sebagaimana dikemukakan di atas, kaji tindak partisipatif memiliki beberapa keterbatasan terutama ditinjau dari segi waktu dan tenaga. Kaji tindak partisipatif memerlukan waktu pelaksanaan yang lebih lama dan banyak tergantung pada inisiatif masyarakat dalam menentukan prioritas. Disamping itu, kaji tindak partisipatif juga memerlukan sikap proaktif peneliti untuk berbaur dan beradaptasi bersama masyarakat dan lingkungan melalui

dedikasi dan komitmen dalam proses implementasi kegiatannya.

Kegiatan kaji tindak partisipatif merupakan sistem kerja yang teratur, paling tidak mengikuti tata urutan yang jelas. Selener (1997) menjelaskan bahwa kaji tindak partisipatif melibatkan urutan kejadian dan kegiatan dalam setiap iterasi (*iteration*), seperti: identifikasi masalah, pengumpulan data, umpan balik dan data analisis, serta aksi (*action*) berdasarkan hasil-hasil penelitian (*research results*). Keputusan tentang apakah metode kaji tindak partisipatif akan diterapkan atau tidak, ditentukan oleh masyarakat dengan fasilitasi dari peneliti.

URGENSI KAJI TINDAK PARTISIPATIF

Sejarah pengembangan padi di Indonesia melalui Bimas dan program Insus berikutnya, menunjukkan bahwa keberhasilan penyebaran paket teknologi dan peningkatan produksi usahatani ini tidak lepas dari peran kaji tindak partisipatif. Penerapan kaji tindak dalam pengembangan padi di Indonesia dimulai sejak dicetuskannya program Swasembada Bahan Makanan (SSBM) pada tahun 1963/1964 (Silitonga *et al.*, 1995). Pada program tersebut, suatu kaji tindak dalam bentuk terobosan penyuluhan berupa Pilot Proyek Panca Usaha Lengkap dilakukan di Kabupaten Karawang (Jawa Barat). Kaji tindak yang dimaksud berlangsung pada Musim Tanam (MT) 1963/1964, dipimpin oleh Lembaga Koor-

dinasi Pengabdian pada Masyarakat (LKPM), Departemen Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP).

Kaji tindak sudah sejak lama menjadi bagian dari kegiatan program diseminasi paket teknologi baru, seperti Intensifikasi Khusus (Insus) yang diperkenalkan tahun 1979, Supra Insus tahun 1987, SUTPA tahun 1994, serta INBIS tahun 1997. Kegiatan kaji tindak lainnya adalah Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K). Hanya saja, pada periode lalu, kaji tindak dalam prakteknya sulit dilakukan, sehingga banyak kegiatannya yang masih bersifat *top-down* (Ana, 2001). Di samping itu, introduksi kelembagaan dari luar kurang memperhatikan struktur dan jaringan kelembagaan lokal yang ada serta kekhasan ekonomi, sosial, dan politik yang berjalan. Pelaksanaan kegiatan ditempuh melalui pembentukan kelompok yang hanya terlihat sebagai alat kelengkapan proyek, belum sebagai wadah pemberdayaan masyarakat secara hakiki. Atau dengan kata lain tidak dilakukan melalui proses sosial yang matang (Syahyuti, 2007).

Paling tidak ada tiga pilar kegiatan kaji tindak partisipatif, yaitu berupa partisipasi, fasilitasi, dan intervensi yang bermuara pada pemberdayaan masyarakat. Uraian lebih rinci tentang ketiga pilar tersebut disampaikan pada bagian berikut.

Partisipasi

Secara semantik, partisipasi memiliki banyak definisi dan interpretasi. Gonsalves *et al.* (2005) mengemukakan sebagai berikut : "... *Participation in society, and in social process, has many shades of meaning. Participation as a customer can be as trivial as choosing which brand of toothpaste to pick up in supermarket. Political participation may be interpreted as casting a vote in a general election every four years. Using terms in this way, participation in research could mean as a little as filling out a questionnaire, or answering a survey*". Dengan demikian, partisipasi dalam kaji tindak partisipatif memiliki pengertian yang berbeda dari definisi tersebut. Dalam konteks ini, partisipasi mengandung pengertian yang berhubungan dengan pengambilan keputusan (*decision-making*), mengingat setiap partisipan dapat memiliki perbedaan dalam hal pengetahuan

dan keterampilan, kebutuhan, peluang, dan sumberdaya lainnya.

Kongkretnya, partisipasi dalam kaji tindak partisipatif adalah proses aktif yang inisiatifnya dilakukan oleh masyarakat sendiri dan dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) yang dapat menegakkan proses pengawsan secara efektif. Secara garis besar, partisipasi dapat dibedakan atas: (1) partisipasi pasif, yaitu masyarakat dilibatkan dalam tindakan yang telah dipikirkan, dirancang, dan dikontrol oleh orang lain; dan (2) partisipasi aktif, yakni proses pembentukan kekuatan untuk keluar dari permasalahan yang dihadapi (Basuno *et al.*, 2005).

Hussein (2000) membedakan karakteristik partisipasi atas dua tingkat kedalaman, yaitu partisipasi bersifat dangkal (*shallow participation*) dan partisipasi mendalam (*deep participation*). Perbedaan mendasar antara kedua tingkat kedalaman partisipasi tersebut antara lain terletak pada esensi, kegiatan, dan tujuannya. Karakteristik partisipasi yang ideal untuk kaji tindak partisipatif adalah partisipasi mendalam, dimana partisipasi difungsikan untuk tujuan pemberdayaan melalui analisis perubahan dan intervensi serta inisiasi tindakan (*action*).

Arnstein (1969) membagi partisipasi dalam proses pemberdayaan masyarakat atas delapan anak tangga (*a ladder of citizen participation*) yang dikelompokkan atas tiga tingkat. Anak tangga pertama dan kedua diklasifikasikan sebagai nonpartisipasi, dimana partisipasi masyarakat masih dalam taraf penanganan dan terapi. Anak tangga ketiga sampai kelima dikategorikan sebagai partisipasi bersifat dorongan (*tokenism*) berupa pemberian informasi, konsultasi, dan konsiliasi. Anak tangga keenam hingga kedelapan dikelompokkan sebagai partisipasi berdasarkan kekuatan warga masyarakat (*power of citizen*) dalam bentuk jalinan kemitraan, pendelegasian kekuatan, dan pengawasan kegiatan pemberdayaan yang bersifat demokratis.

Sesuai dengan tipologi Pretty (1995), partisipasi yang sesuai dengan kaji tindak partisipatif adalah partisipasi interaktif (*inter-active participation*), dimana masyarakat berpartisipasi dalam menganalisis situasi melalui aksi bersama (*collective action*) dengan metode inter-disiplin dan proses pembelajaran se-

cara terstruktur. Implementasinya, masyarakat dapat mengawasi keputusan lokal dan memiliki keterkaitan dalam menjaga serta sekaligus memperbaiki struktur dan kegiatan yang dilakukan. Sementara itu, menurut Johnston (1982), tingkat pertanggungjawaban (*level of responsibility*) partisipasi yang cocok dengan kaji tindak partisipatif adalah partisipasi kreativitas (*participation through creativity*). Dalam konteks ini, masyarakat dilibatkan dalam mendefinisikan situasi mereka, menentukan prioritas, perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Dengan kata lain, masyarakat berkreasi dan melalui partisipasi mereka bertanggungjawab atas program mereka sendiri.

Kata kunci dari tipologi partisipasi sebagaimana dikemukakan di atas adalah “aksi bersama” (*collective action*). Terkait dengan ini, Werner (1998) mengemukakan bahwa aksi bersama ini sebetulnya sudah merupakan bagian dari tradisi bangsa Indonesia, misalnya aktivitas yang diorganisir masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik. Oleh karena itu, tradisi tersebut seyogyanya dapat dijadikan sebagai modal dalam mengajak masyarakat berintegrasi dalam kaji tindak partisipatif. Kendati demikian, Grootaert (2002) menggarisbawahi bahwa partisipasi dalam aksi bersama yang dimaksud memiliki signifikansi yang berbeda pada setiap kelompok masyarakat. Partisipasi yang demikian sesuai untuk diterapkan di Indonesia yang memiliki berbagai etnis.

Fasilitasi

Fasilitasi dapat didefinisikan sebagai suatu seni (*art*) dalam memotivasi masyarakat menuju tujuan yang disepakati bersama melalui proses peningkatan partisipasi, kepemilikan, dan kreativitas bagi semua yang terlibat di dalamnya (Gonsalves *et al.*, 2005). Fasilitasi merupakan teknik yang banyak dikembangkan dalam melaksanakan pemberdayaan secara partisipatif, karena teknik ini menggunakan tingkat intervensi yang sangat rendah (Sumpeno, 2004). Melalui teknik fasilitasi, masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dapat terungkap, sehingga memungkinkan untuk melakukan perencanaan dan penerapan transfer teknologi secara lebih baik.

Dalam pelaksanaan kaji tindak partisipatif, biasanya terdapat peran fasilitator yang

berhubungan langsung dengan pemilik masalah (*problem owner*), dimana peran sebagai fasilitator tersebut dapat dimainkan oleh peneliti sendiri atau oleh pihak lain. Pemisahan peran fasilitator dan peneliti sebenarnya tidak secara tegas perlu dilakukan, karena pada hakekatnya peran fasilitator sendiri merupakan bagian dari perancangan penelitian. Pemisahan peran fasilitator dan peneliti lebih disarankan agar pelaksanaan kaji tindak partisipatif dapat memberi perhatian yang lebih fokus terhadap masing-masing peran (Stinson, 1979). Kendati demikian, dalam pelaksanaan kaji tindak – sampai derajat tertentu – peneliti juga berperan sebagai fasilitator.

Kegiatan fasilitasi merupakan upaya untuk menjembatani perbedaan karakter dan pemikiran individu, sehingga dapat membantu menggabungkan perbedaan secara efektif dan menciptakan keadaan yang nyaman agar masyarakat mampu menemukan kesamaan serta kesepakatan pikiran dan tindakan (Basuno *et al.*, 2005). Kegiatan fasilitasi dilakukan untuk menciptakan lingkungan kondusif dalam transfer teknologi dan pengetahuan dari nara sumber kepada masyarakat, baik dalam kegiatan perencanaan, pelatihan, studi banding, implementasi di lapangan, serta monitoring dan evaluasi. Peran fasilitator menjadi sangat penting karena dapat dianggap sebagai ujung tombak serta kunci keberhasilan dari suatu perubahan di masyarakat. Kemampuan mendengarkan keluhan masyarakat menjadi syarat utama bagi seorang fasilitator.

Pelatihan merupakan elemen penting dalam fasilitasi, misalnya dalam kegiatan transfer pengetahuan dan keterampilan atau dalam kegiatan introduksi teknologi (Sumpeno, 2004). Dalam hal ini, kepakaran instruktural (*trainer's capacity*) merupakan bagian utama yang harus dipenuhi, sehingga penyediaan tenaga ahli (nara sumber) harus didatangkan dari lembaga yang kompeten dalam bidang yang bersangkutan. Penentuan kriteria kepakaran diserahkan kepada peneliti, sedangkan materi pelatihan ditentukan sesuai keinginan masyarakat. Dalam kaji tindak, pelatihan tidak hanya terfokus pada kegiatan (usaha) fisik teknis semata, tetapi secara simultan mencakup kegiatan non-fisik berupa pembinaan masyarakat (organisasi kelompok) sebagai basis kegiatan pemberdayaan. Pembinaan ditujukan guna menciptakan suasana kondusif

bagi semua anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan ketatalaksanaan (*managerial*) mereka secara berkesinambungan, sehingga pada gilirannya tercipta suatu proses pelembagaan (*institutionalized*) organisasi.

Studi banding merupakan salah satu jenis fasilitasi penting yang dikembangkan melalui kegiatan saling tukar menukar pengalaman. Kegiatan ini tidak hanya terbatas dalam hal aplikasi teknologi, tetapi juga belajar cara menyelesaikan dan mengantisipasi permasalahan. Salah satu model studi banding yang cukup efektif dilakukan adalah anjongsana petani (*farmer-to-farmer visit*) sebagaimana dilakukan tim kaji tindak partisipatif Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSE-KP) bersama masyarakat petani Desa Balekambang, Nagrak, Sukabumi (Basuno *et al.*, 2005). Dalam pelaksanaannya, melalui model anjongsana, para petani yang bersangkutan dapat belajar dari kondisi nyata (*real*). Selain itu, petani (sukses) yang dikunjungi dapat mentransfer ilmu dan pengalaman yang dimilikinya secara terbuka, tanpa ada kekhawatiran akan tersaingi. Kegiatan kunjungan ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga merupakan salah satu bentuk studi banding dalam rangka memotivasi masyarakat pertanian di pedesaan.

Dibutuhkan pendampingan untuk mengimplikasikan teknologi yang diperoleh dari hasil pelatihan dan studi banding. Hal demikian dilakukan guna memastikan bahwa teknologi yang diterapkan masyarakat sesuai dengan yang mereka peroleh, sehingga pelatih tetap berperan mendampingi dalam implementasi tersebut. Konsultasi dengan pelatih kemungkinan akan tetap diperlukan setelah kegiatan implementasi, khususnya apabila terjadi masalah yang sulit ditanggulangi atau dalam rangka memperbaiki teknologi pada implementasi teknologi periode berikutnya (Basuno *et al.*, 2005). Perlu ditambahkan bahwa pendampingan sendiri memerlukan dana yang tidak sedikit, terutama untuk menjamin keberlangsungan penerapan hasil studi banding.

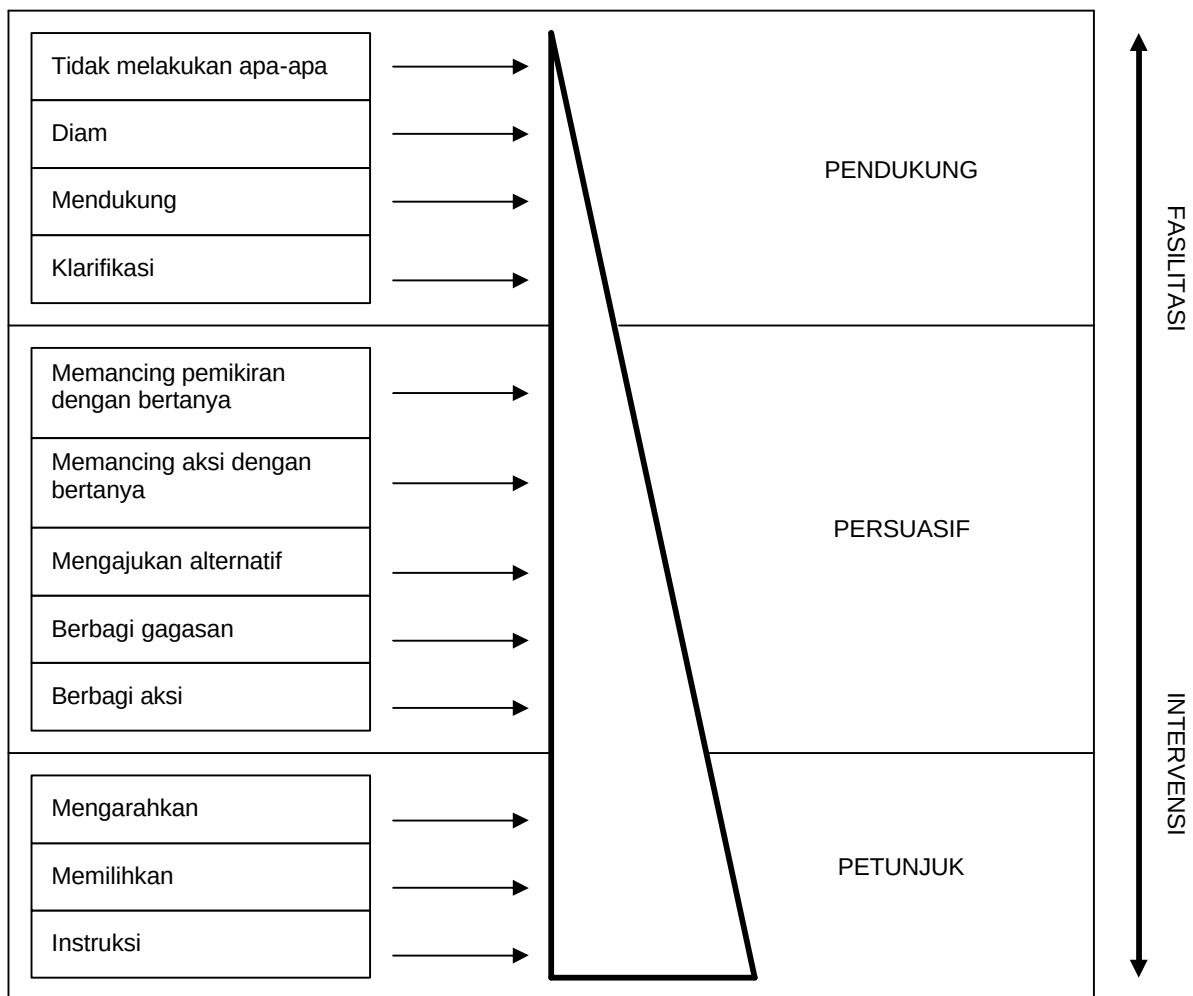
Kegiatan monitoring dan evaluasi tidak hanya dilakukan pada akhir kegiatan, tetapi merupakan kegiatan yang terus menerus dilakukan. Seperti halnya terjadi pada pelatihan, studi banding, dan implementasi kegiatan, monitoring dan evaluasi juga penting dilakukan

secara partisipatif (*participatory monitoring dan evaluation*) oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dengan fasilitasi dari peneliti. Gonsalves *et al.* (2005) mengemukakan bahwa monitoring dan evaluasi partisipatif merupakan usaha kerjasama antara peneliti dan para pemangku kepentingan seperti petani, petugas pemerintah, dan penyuluh untuk memonitor dan mengevaluasi penelitian atau kegiatan pembangunan secara sistematis. Dengan kata lain, monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk melihat sampai sejauh mana pelaksanaan kaji tindak partisipatif dapat memberikan perubahan pada masyarakat.

Intervensi

Intervensi adalah kebijakan atau tindakan dengan tujuan untuk membantu sesuatu pada suatu kondisi tertentu (Hornby, 1995). Secara positif, intervensi mengandung makna pendekatan yang bersifat fleksibel dan induktif sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan suatu masyarakat (Selener, 1997). Dalam konotasi lebih spesifik, terkait dengan kaji tindak partisipatif, intervensi merupakan bagian yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses fasilitasi. Dengan kata lain, walaupun istilah fasilitasi dalam pelaksanaan perencanaan, pelatihan, studi banding, implementasi kegiatan, serta monitoring dan evaluasi digunakan; tetapi pada hakekatnya (sampai pada tingkat tertentu) di dalamnya terkandung unsur intervensi.

Sumpeno (2004) mengemukakan bahwa intervensi sebenarnya lebih mengarah kepada persuasif atau intervensi itu sendiri (Gambar 3). Hal demikian dapat dikemukakan pada kasus introduksi teknologi, dimana transfer pengetahuan dan keterampilan (*transfer of knowledge dan skills*) memerlukan unsur intervensi di dalamnya. Akan tetapi, unsur intervensi dalam pelaksanaan fasilitasi tetap berpedoman pada prinsip demokrasi, dimana masyarakat diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Yusof (1989) bahwa dalam pedoman demokratis, faktor manusia lebih didahulukan antara lain dalam kegiatan. Dengan cara yang demokratis, kegiatan intervensi memiliki dampak yang baik karena masyarakat tetap termotivasi. Cara seperti ini dapat menghasilkan dampak jangka panjang, dibanding pelaksana-



Gambar 3. Tingkatan Intervensi dalam Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (Sumpeno, 2004)

annya yang menggunakan cara 'paksaan' yang dilandaskan pada kekuasaan. Dengan pertimbangan adanya berbagai kelebihan dalam konsep fasilitasi, teknik tersebut juga digunakan dalam pembentukan kelompok masyarakat.

Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah pilihan, kebebasan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, martabat, penghargaan, kerjasama, dan rasa saling memiliki pada komunitas (Gonsalves *et al.*, 2005). Jo Rowldan *dalam* Buchori *et al.* (2003) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses dimana individu, organisasi atau kelompok yang dalam kondisi tidak

berdaya (*powerless*) menjadi sadar dan tahu (*having knowledge*) akan dinamika kekuasaan yang bekerja dalam konteks kehidupan mereka, membangun ketrampilan dan kapasitas untuk memperoleh kontrol pada kehidupan mereka, menjalankan (*exercise*) kontrol tanpa mengganggu hak-hak orang lain, dan mendukung upaya pemberdayaan (individu atau kelompok) lain dalam masyarakat. Keempat proses tersebut juga dapat digunakan sebagai indikator kasar untuk mengukur sampai sejauh mana suatu upaya pemberdayaan telah berhasil dilakukan.

Dalam konteks pengembangan masyarakat pertanian dan perdesaan, Sumodiningrat (1997) mengartikulasikan pemberdayaan ke dalam tiga aspek, yaitu: (1) menciptakan

iklim atau kondisi yang memungkinkan potensi masyarakat setempat berkembang, (2) memperkuat potensi atau energi dan modal sosial yang dimiliki masyarakat agar mereka mampu meningkatkan mutu kehidupan ke arah yang lebih baik, dan (3) melindungi atau mencegah kekuatan atau tingkat kehidupan masyarakat yang sudah lemah agar tidak menjadi semakin lemah.

Kaji tindak partisipatif pada hakekatnya merupakan bagian dari kegiatan pemberdayaan, karena di dalamnya terkandung kontribusi upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencapai peningkatan kesejahteraan. Kaji tindak partisipatif bukan hanya diharapkan dapat memberikan keberhasilan dari sisi perbaikan teknologi, tetapi juga mendatangkan kepuasan bagi masyarakat dan sekaligus menciptakan keyakinan bahwa mereka mampu memperbaiki kehidupan dengan kekuatan sendiri. Manfaat dari aspek ini perlu ditekankan, untuk lebih menjamin agar masyarakat dapat berdaya secara berkelanjutan. Namun perlu dicermati bahwa keberhasilan dan optimalisasi manfaat dari pelaksanaan kaji tindak partisipatif dalam hal pemberdayaan masyarakat, tergantung pada kemampuan fasilitator dalam memfasilitasi keperluan masyarakat.

Folla dalam Basuno et al. (2005) memberi pengertian yang lebih mendalam bahwa pemberdayaan adalah suatu perubahan yang membentuk kemandirian dan partisipasi. Kemandirian adalah proses kebangkitan kembali dan pengembangan kekuatan pada diri manusia yang mungkin sudah hilang karena ketergantungan, eksploitasi, dan subordinasi. Kemandirian dapat dibedakan menjadi: (1) kemandirian material, yaitu kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan materi dasar serta cadangan dan mekanisme untuk dapat bertahan pada waktu krisis; (2) kemandirian intelektual, yaitu pembentukan dasar pengetahuan otonom oleh masyarakat yang memungkinkan mereka menanggulangi bentuk-bentuk dominasi yang lebih halus yang muncul di luar kontrol pengetahuan; dan (3) kemandirian ketatalaksanaan, yaitu kemampuan otonom untuk membina diri dan menjalani serta mengelola kegiatan kolektif agar terjadi perubahan dalam situasi kehidupan.

Pemberdayaan dapat dipandang sebagai proses bertingkat yang melibatkan indi-

vidu, komunitas dan organisasi. Keterlibatan individu berkaitan dengan keterlibatan dalam pengambilan keputusan, sedangkan komunitas berhubungan dengan dampak keterlibatan. Sementara itu, organisasi adalah struktur yang mengakomodasi (mediator) dan sekaligus memfasilitasi kegiatan aksi bersama berbasis komunitas (Checkoway, 1995).

Salah satu kegiatan kaji tindak partisipatif pemberdayaan masyarakat yang cukup berhasil dilaksanakan di Indonesia adalah program Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Melalui program ini, diperkenalkan metode pembelajaran partisipatif melalui Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu atau SLPHT (Dilts dan Pointius, 2000). Proses pembelajaran ditekankan pada pengambilan keputusan dan tindakan berdasarkan diskusi terbuka (bebas dari dominasi). Dalam SLPHT, di samping penekanan aspek ekologi, para pesertanya juga mendapatkan pembelajaran dalam hal dinamika sosial kemasyarakatan. Dengan kata lain, peserta SLPHT tidak hanya belajar tentang hubungan kausalitas di tingkat lapangan, tetapi mereka juga memperoleh pengertian mengenai hubungan antar sesama manusia.

Setelah mengikuti SLPHT, para petani memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta membuat keputusan, untuk selanjutnya mereka terapkan dalam berbagai aspek teknis dan ekonomis terkait dengan penggunaan input dan biaya usahatani. Hasil dari kegiatan program ini merupakan bagian dari proses pemberdayaan, di antaranya terkait dengan peningkatan produksi dan keuntungan, penurunan risiko kesehatan sebagai dampak dari penggunaan pestisida, serta pelestarian lingkungan. Melalui proses pembelajaran tersebut, petani menjadi lebih berdaya (*empowered*) dalam mengelola lahan usahatani mereka (Velasco, 2000; SEAMEO SEARCA, 1996).

Kasus usahatani kopi di Kabupaten Malang dan Kediri menunjukkan bahwa pemberdayaan petani dalam bidang sosial, ekonomi/finansial, dan kesadaran lingkungan merupakan hasil konsekuensi dari partisipasi mereka dalam Program Pengendalian Hama Terpadu-Perkebunan Rakyat (PHT-PR). Secara umum, para petani kopi menjadi lebih berdaya setelah mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dari pelatihan SLPHT. Hal tersebut antara lain ditunjukkan oleh pening-

Tabel 2. Tingkat Pemberdayaan Petani Peserta PHT-PR Kopi di Kabupaten Malang dan Kediri, Jawa Timur, 2002

Pemberdayaan	Malang		Kediri		Rataan	
	$\bar{X}$	Deskripsi	$\bar{X}$	Deskripsi	$\bar{X}$	Deskripsi
Sosial :						
a. Pengetahuan dan keterampilan	3,90	tinggi	3,74	tinggi	3,82	tinggi
b. Perubahan perilaku budidaya	3,50	tinggi	3,30	tinggi	3,40	tinggi
c. Pengambilan keputusan	3,46	tinggi	3,38	tinggi	3,42	tinggi
Ekonomi/finansial :						
a. Penurunan biaya produksi	1,76	rendah	1,70	rendah	1,73	rendah
b. Peningkatan produksi	4,16	sangat tinggi	4,04	sangat tinggi	4,10	sangat tinggi
c. Peningkatan keuntungan	2,64	sedang	2,58	sedang	2,61	sedang
Kesadaran lingkungan	3,86	tinggi	3,73	tinggi	3,80	tinggi
Total	3,33	tinggi	3,21	tinggi	3,27	tinggi

Sumber : Iqbal, 2003

Keterangan : $\bar{X}$ = 0,0-1,0 (sangat rendah); 1,1-2,0 (rendah); 2,1-3,0 (sedang); 3,1-4,0 (tinggi); 4,1-5,0 (sangat tinggi)

katan hasil skor pendahuluan (*pre-test*) dan akhir (*post-test*) pada pengetahuan (*ballot box test*) sebelum dan setelah pelaksanaan SLPHT. Secara agregat, petani SLPHT di Kabupaten Malang memperoleh peningkatan skor dari 51,7 persen menjadi 78,2 persen dan petani di Kabupaten Kediri mendapatkan peningkatan skor dari 46,6 persen menjadi 68,9 persen (Bagpro PHT-PR Jawa Timur, 2003).

Selanjutnya, persepsi petani terhadap pemberdayaan dari Program PHT-PR di Kabupaten Malang dan Kediri dapat diperhatikan pada Tabel 2. Secara keseluruhan, tingkat pemberdayaan petani cukup tinggi, yakni mencakup aspek sosial, ekonomi/finansial, dan lingkungan. Dari aspek sosial, petani berpendapat bahwa mereka mendapatkan pemberdayaan dari Program PHT-PR dalam hal pengetahuan dan keterampilan, perubahan perilaku budidaya, dan pengambilan keputusan. Dalam prakteknya, sebagian petani menerapkan paket rekomendasi sesuai dengan kebutuhan mereka (tidak serumit Program PHT-PR). Dari aspek ekonomi/finansial, petani menganggap bahwa Program PHT-PR dapat meningkatkan produksi dengan sedikit peningkatan keuntungan. Sedikitnya tingkat keuntungan tersebut lebih disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi dalam penerapan Program-PHT-PR dan rendahnya harga kopi. Dari aspek lingkungan, petani menyadari bahwa Program PHT-PR mampu meningkatkan kesadaran mereka terhadap lingkungan (ekologi konservasi).

Dari beberapa gambaran di atas, dapat diberikan catatan bahwa peran pemerintah dalam kaji tindak pemberdayaan masyarakat partisipatif tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut disadari mengingat pemerintah merupakan bagian dari sistem masyarakat yang dapat mempengaruhi pelaksanaan maupun pelem-bagaan pelaksanaan (*continuity*) pemberdayaan masyarakat. Curtis dan Lockwood (2000) menegaskan bahwa dalam rangka upaya pengembangan aspirasi masyarakat (*bottom-up approach*) tetap membutuhkan upaya yang bersifat pendekatan dari atas (*top-down approach*). Akan tetapi, Bunch (1991) mengingatkan bahwa kegiatan pemberdayaan harus mampu menghindarkan sikap paternalisme, karena hal ini dapat menyebabkan sikap ketergantungan masyarakat dalam memecahkan masalah pembangunan yang mereka hadapi.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kendati kaji tindak (*action research*) sudah cukup banyak dan telah lama diimplementasikan di Indonesia, namun secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaannya masih kurang mengakomodasi aspirasi petani. Dalam berbagai aktivitas kaji tindak tersebut, secara fisik petani praktis memang dilibatkan, namun hanya dalam rangka melaksanakan anjuran peneliti. Oleh karena itu, untuk lebih mengakomodasi aspirasi petani dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kaji tindak, penggunaan metoda kaji tindak yang partisipatif (*part-*

icipatory action research) perlu direkomendasikan.

Kegiatan kaji tindak partisipatif memiliki komponen yang cukup banyak dan bersifat dua arah, yaitu dari pihak pelaksana ke masyarakat dan sebaliknya. Komponen-komponen tersebut meliputi : (1) transfer informasi dari pihak pelaksana kepada masyarakat maupun dari masyarakat ke pelaksana; (2) penyadaran terhadap masyarakat tentang masalah dan potensi yang dimiliki mereka (terjadi dua arah); (3) proses motivasi masyarakat untuk mengatasi masalah mereka sendiri; (4) transfer inovasi dan memotivasi masyarakat untuk menerapkan inovasi dan hasil perbaikannya; dan (5) pelembagaan penerapan inovasi.

Titik tumpu (*entry point*) kaji tindak partisipatif adalah partisipasi, fasilitasi, dan intervensi dalam piranti kelembagaan (*rule of the game*) dengan penggerak organisasi kelompok (*collective action*) yang bermuara pada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat sasaran diposisikan menjadi subyek dan sekaligus penggerak pembangunan. Partisipasi interaktif dan kreativitas serta fasilitasi dan intervensi yang berpedoman pada prinsip demokrasi perlu dijalankan, karena penerapan prinsip demokrasi merupakan bagian dari pengakuan masyarakat sebagai perubahan yang utama.

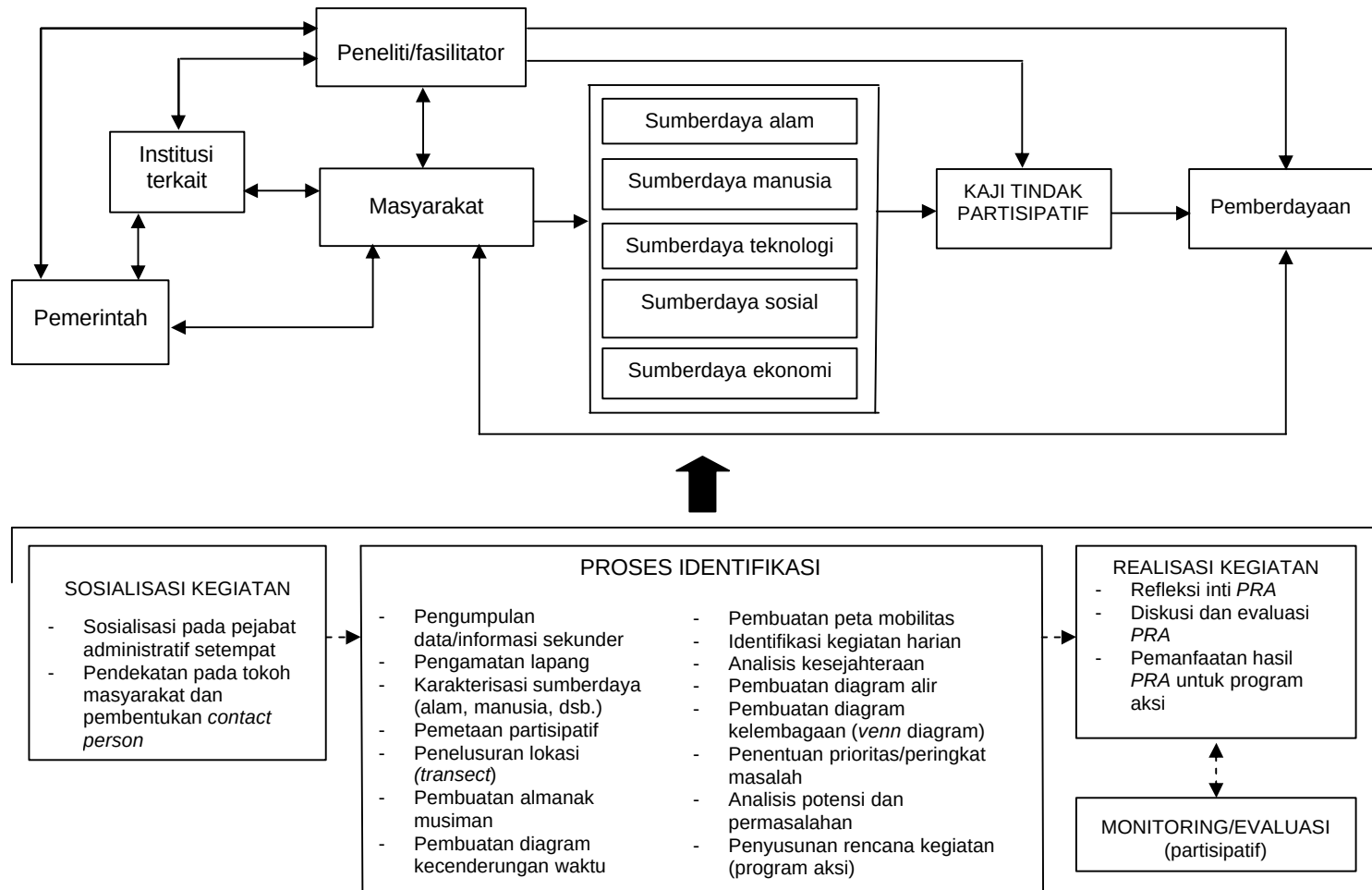
Dampak keseluruhan dari kegiatan kaji tindak partisipatif adalah terwujudnya kemandirian masyarakat, yakni masyarakat yang mampu memecahkan masalah mereka sendiri. Hal ini tidak terbatas pada aspek ekonomi semata, tetapi juga terkait dengan rasa keadilan, jaminan keamanan, peluang memperoleh pendidikan, peluang berusaha, dan berbagai kemudahan untuk kelangsungan peningkatan taraf hidup lainnya. Implikasinya, pengembangan aspirasi masyarakat (*bottom-up approach*) tetap membutuhkan upaya yang bersifat pendekatan dari atas (*top-down approach*) namun sangat dijauhkan dari sikap paternalistik. Berbagai pengalaman keberhasilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat perlu dijadikan acuan, terutama proses implementasinya guna menjamin terciptanya kemandirian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana, B.R. 2001. Sintesa Model Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Proyek P4K, KUM, P2LK, PHT, KUF dan DELIVERI). Bina Swadaya dan Department for International Development. Jakarta.
- Avison, D., R. Baskerville, and M. Myers. 2001. Controlling Action Research Projects. Information Technology and People, Vol. 14, No. 1.
- Bagpro PHT-PR Jawa Timur. 2003. Laporan Pelaksanaan SLPHT (Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu) Kopi Jawa Timur. Bagian Proyek Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat Jawa Timur. Jombang.
- Basuno, E., R.N. Suhaeti, S. Wahyuni, R.S. Rivai, T. Pranaji, G.S.Budhi, dan M. Iqbal. 2005. Kaji Tindak (Action Research) Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Tertinggal. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Brown, L.D. 1985. People Centered Development and Participatory Research. Harvard Educational Review. Vol. 55, No. 3. Boston.
- Buchori, A., Sanusi, dan S.R. Amelia (Editor). 2003. Hanya Sebuah Langkah, Bukan Akhir Perjalanan. PWD-IPB. Bogor.
- Bunch, R. 1991. Dua Tongkol Jagung : Pedoman Pengembangan Pertanian Berpangkal pada Rakyat. Terjemahan dari Two Ears of Corn : A Guide to People-Centered Agricultural Development (Penerjemah : Ilya Moeltono). Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Burns, R. 1994. Introduction to Research Methods in Education (second edition). Longman Cheshire, Melbourne.
- Chalmers, A.F. 1982. What is this Thing called Science? University of Queensland Press, Brisbane.
- Checkldan, P. 1991. From Framework through Experience to Learning : the Essential Nature of Action Research (Editor : Nissen, H.E., et al). Information Systems Research, Contemporary Approaches and Emergent Traditions. Elsevier, Amsterdam.
- Checkoway, B. 1995. Six Strategies of Community Change. Community Development Journal Vol. 30, No. 1. Oxford University Press. Oxford.
- Curtis, A. and Lockwood, M. 2000. Landcare dan Catchment Management in Australia :

- Lesson for State-Sponsored Community Participation. Society and Natural Resources. Vol. 13, No. 1.
- Deptan. 2002. Agricultural Development Program 2001-2004. Ministry of Agriculture. Jakarta.
- Dilts, R. dan J. Pointius. 2000. Integrated Pest Management-Farmers Field School (IPM-FFS) : Changing Paradigm and Scaling-up. Agriculture Research and Extension Network Paper. Indonesian National IPM Program. Jakarta.
- Elden, M., and Chisholm, R.F. 1993. Emerging Varieties of Action Research : Introduction to the Special Issue. Human Relation.
- Gonsalves, J., T. Becker, A. Braun, D. Campilon, H. de Chaves, E. Fajber, M. Capiriri, J.R. Caminade, and R. Vernooy (Editors). 2005. Participatory Research and Development for Sustainable Agricultural and Natural Resource Management : A Resource Book (Glossary). International Potato Center-Users Perspective with Agricultural Research and Development. Philippines.
- Good, C.V. dan D.E. Scates. 1972. Methods of Research. Apleton-Century-Crofts. New York.
- Grootaert, C. 2002. Quantitative Analysis of Social Capital Data. Understanding and Measuring Social Capital : A Multidisciplinary Tool for Practitioners (Editors : Grootaers, C., and T. van Bastelaer). The World Bank. Washington DC.
- Henderson, D. 2005. Action Research as a Strategy for Advancing Community-Based Natural Resources Management. Participatory Research and Development for Sustainable Agricultural and Natural Resource Management : A Resource Book (Editors : Gonsalves, J. *et al*). International Potato Center-Users Perspective with Agricultural Research and Development. Philippines.
- Hornby, A.S. 1995. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. (Editors : Jonathan C., K. Kavanagh, and M. Ashby). Oxford University Press. Oxford.
- Hult, M. dan S. Lennung. 1980. Towards a Definition of Action Research : A note and a Bibliography. Journal of Management Studies. Vol. 17.
- Iqbal, M. 2003. Farmer's Participation and Empowerment in the Coffee Integrated Pest Management for Smallholder Estate Crops in East Java Province. Unpublished Master Thesis. University of the Philippines. Los Baños.
- Johnston, M. 1982. The Labyrinth of Community Participation : Experience in Indonesia. Community Development Journal, Vol. 17, No. 3.
- Kerlinger, F.N. 1973. Foundations of Behavioral Research. Eaglewood Clift, Prentice-Hall. New York.
- McKay, J. and P. Marshall. 2001. Dual Imperatives in Action Research. Information Technology and People. Vol. 14, No. 1.
- Niehof, A., G.T. Castillo, and K.O. Fuglie. 2003. Participatory Research with User Groups : Key Issues and Challenges. International Potato Center. Philippines.
- Pakpahan, A. 2005. Investing on Farmers' Welfare. Jakarta Post, 11 February 2005. Jakarta.
- Pretty, J. 1995. Regenerating Agriculture : Policies and Practice for Sustainability and Self-Reliance. Earthscan Publications. London.
- SEAMEO SEARCA. 1999. Empowering Farmers : The Second Edition Monograph of the SEMEAO SEARCA Evaluation Team through the KASAKALIKASAN Program. Pre-Project Completion-Impact Evaluation (KaPCIE) Project. (Editors : Medina J.R. and D.P. Callo Jr). The Southeast Asian Members of Education Organization – Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture. Philippines.
- Selener, D. 1997. Participatory Action Research and Social Change. Cornell University. Ithaca, New York.
- Silitonga, C., D.J. Rachbini, M.H. Sawit, dan A. Pakpahan. 1995. Perkembangan Ekonomi Pertanian Nasional (1969-1994). Peringatan 25 Tahun Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia. Jakarta.
- Stinson, A. 1979. Action Research for Community Action in Community Development : Theory and Method of Planned Change (Editor : A. Chekki). Vikas Publishing House PVT Ltd., New Delhi, Bombay, Bangalore, Calcutta, Kanpur.
- Sumodiningrat, G. 1997. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. PT Bina Rena Pariwara. Jakarta.
- Sumpeno, W. 2004. Sekolah Masyarakat: Menerapkan Rapid Training Design Dalam Membangun Kapasitas. Catholic Relief Services. Jakarta.
- Syahyuti. 2007. Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai Kelembagaan Ekonomi Perdesaan. Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 5, No. 1,

- Maret 2007. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Tandon, R. 1981. Participatory Research in the Empowerment of People. Center for Continuing Education. Canberra.
- Velasco, L.R.I. 2000. Extension Approaches to Rice Integrated Pest Management in the Philippines. Proceeding of Workshop on "Recent Agricultural Extension Approaches". University of the Philippines. Los Baños.
- Werner, S. 1998. Local Level Institution and Collective Action. Social Development Department. The World Bank. Washington DC.
- Yusof, K., S. Batumalai; W.Y. Lin, and J. Okamura. 1989. Manual : the ABCs of Community Participation in Primary Health Care. Department of Publication, University of Malaya. Kuala Lumpur.



Gambar 1. Pelaksanaan Kaji Tindak Pemberdayaan Masyarakat (Basuno *et al.*, 2005)